

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, meningkatkan kapasitas finansial desa melalui Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan.(Suyanto, 2001)

Menurut Nurcholis (Surabaya & Desymhsunesaacid, 2017) upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan anggaran dana yang tersedia melainkan juga pengentasan masalah kemiskinan. Kemiskinan Sebagai suatu permasalahan yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam pengelolaan dan minimnya sumber daya untuk mendorong potensi yang tersedia.

Kesejahteraan rakyat merupakan masalah pokok yang harus diperhatikan oleh pemerintahan indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk di perkotaan memiliki tingkat

kemiskinan sebesar 8,6% sedangkan penduduk di pedesaan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 14,6%. Menurut (BPS,2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk deprivasi dalam kesejahteraan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menyusun strategi guna upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan cara melakukan strategi pemberdayaan masyarakat. (Parida et al., 2019).

Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Studi yang dilakukan Wignjosoebroto dkk., (1992) tentang kehidupan masyarakat rentan, ia menemukan bahwa seseorang atau sebuah keluarga yang dijejaskan kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, sedangkan untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada taraf yang subsisten saja saja bagi keluarga miskin hampir - hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya.(Suyanto, 2001)

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberian Dana Desa sebagai perwujudan agenda Nawa Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Undang-Undang tentang desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan (Kumolo, 2017 : 215).

Pemberdayaan Masyarakat menjadi upaya penting dalam mendorong masyarakat desa untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya dan berdiri tegak diatas kakinya sendiri, memiliki daya saing serta mandiri. Melalui Program Inovasi Desa, mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa menggunakan Dana Desa.

Puluhan triliun dana telah dikeluarkan pemerintah sebagai wujud dukungan terhadap misi pembangunan desa. Di mana target pemerintah di tahun 2019 setidaknya mencapai 2.000 Desa mandiri serta mengentaskan 5.000 Desa tertinggal menjadi berkembang. Dana desa yang disalurkan juga terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 sebesar Rp. 20,67 Triliun, kemudian tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 Triliun, tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 60 Triliun serta tahun 2019 dialokasikan hingga Rp.73 Triliun.(goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

Secara bertahap upaya pemerintah untuk mengangkat desa dari ketertinggalan mulai menampakkan hasil. Hal itu terlihat dari perbaikan beberapa status desa,

terutama perbaikan dari status desa tertinggal menjadi berkembang yang semakin mendekati target. Namun sayangnya, tidak demikian untuk perubahan status desa mandiri. Yakni dari 173 Desa pada tahun 2015, baru mencapai 313 desa mandiri pada tahun 2018 (<https://new.detik.com/kolom>, 26 september 2018). Peningkatan tersebut masih jauh dari target yang diinginkan, karena sebagian besar Desa-Desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum mampu menangkap peluang digulirkannya program inovasi desa.

Guna mewujudkan pembangunan desa yang merata, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada semua lini. Apalagi ketimpangan Pembangunan baik fisik maupun SDM antara wilayah perdesaan dengan perkotaan masih tinggi. Karena keterbatasan kapasitas itulah, kebanyakan desa di Indonesia belum mampu mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, Program Inovasi Desa (PID) yang diluncurkan Kementerian Desa PDTT diharapkan mampu mendorong Pemerintah Desa menjadi lebih kreatif dan inovatif mengembangkan potensi lokal untuk mempercepat pembangunan Desa dan penanggulangan kemiskinan. (Parida et al., 2019)

Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing. Peningkatan kapasitas Desa dalam PID dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan

mempersiapkan lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) untuk membantu pembangunan desa dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumberdaya.

Kampung Bakaro pada tahun 2017 nampak masih belum memiliki orientasi pembangunan yang jelas. Padahal itu sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan UU Desa No.6 Tahun 2014. Seperti halnya desa-desa lainnya, Bakaro juga menerima Dana Desa. Dana Desa belum digunakan secara optimal, salah satunya dapat diketahui dari tidak adanya pembangunan yang ditunjukkan pada upaya optimalisasi potensi wisata desa. Lemahnya orientasi pembangunan di Kampung Bakaro berakar pada belum adanya kesadaran dan kreativitas pemerintah desa masyarakat setempat sehingga diperlukannya pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa, tetapi masyarakat harus lebih dahulu memahami program tersebut.

Penelitian ini sesuai dengan salah satu topik penelitian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander (Soehartono, 2015 : 15) sebagai berikut : “ Studi tentang sejarah lembaga-lembaga amal, perundang-undangan kesejahteraan sosial, program-program kesejahteraan sosial, dan konsep-konsep pekerjaan sosial”. Program-program kesejahteraan sosial yang diberikan melalui pelaksanaan program pemberdayaan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa menggunakan dana desa dan anggaran dana desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari ?
2. Bagaimana potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari ?
3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian tentang Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Potensi Diri Masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang tentang uraian diatas, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Oleh karena itu, penulisan usulan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial terutama di sekitar Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah-masalah dan saran kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, serta pihak-pihak terkait lainnya, sehingga mereka dapat memahami hal yang berkaitan dengan pengaruh pemberdayaan

masyarakat terhadap potensi diri masyarakat desa di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

1.4 Kerangka Pemikiran

Sebagai landasan pokok pemikiran dalam tugas ini, peneliti mengajukan kerangka pemikiran yang menjadi landasan teori dalam pembahasan. Adapun fokus utama dalam pembahasan penelitian adalah pemberdayaan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan, kegiatan serta gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan standard taraf hidup, memecahkan masalah sosial, memperkuat struktur sosial masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga ketentraman masyarakat, serta untuk memungkinkan setiap warganegara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dikutip dari Fahrudin (2014 : 9) sebagai berikut :

Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial ialah sistem dari pelayanan sosial yang digunakan demi peningkatan standar hidup serta kesehatan yang mendukung dan hubungan yang baik dengan lingkungannya agar dapat tercapainya keberfungsian sosial dan dapat mengembangkan kemampuan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan definisi tersebut mengatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang secara nyata berusaha menjawab kebutuhan apapun masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dapat diarahkan pada individu keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Terkait dengan bidang kesejahteraan sosial menurut Zastrow (Suharto, 2014 : 24) yaitu :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk mendorong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Pekerjaan sosial dalam aktifitas profesional melakukan pendampingan untuk membantu masyarakat dalam menangani masalah-masalah serta hambatan untuk mewujudkan keberfungsian sosial mereka. Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan keberfungsian sosial mereka adalah adanya masalah sosial yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial menurut Soekanto (2013 : 314), yaitu :

Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa masalah sosial terjadi karena ketidaksesuaian budaya maupun masyarakat dan dapat berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bagi individu, masyarakat, maupun kelompok. Masalah sosial muncul akibat perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.

Pelayanan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktifitas suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun komunitas masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada dimasyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Definisi pelayanan sosial menurut Kahn yang dikutip Fahrudin (2014:13) :

Pelayanan sosial adalah program-program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu-individu mengatasi masalah-masalah yang berasal dari luar maupun dalam diri, meningkatkan perkembangan, dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan konkret.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah kesejahteraan sosial diharapkan dapat terpecahkan melalui pemberian dasar-dasar pengetahuan yang dapat dijangkau oleh penerima pelayanan sosial yang dianggap penting, untuk keberhasilan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dengan mempelajari berbagai macam keterampilan tertentu.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, berpartisipasi, berorganisasi, memperngaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung-gugat demi perbaikan kehidupannya. Seperti yang dikemukakan oleh Subejo dan Narimo (Mardikanto & Soebiato, 2019:32) yaitu :

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelolah sumberdaya lokal yang dimiliki melalui tindakan kolektif dan jaringan yang dapat menimbulkan masyarakat mendapatkan kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial sehingga masyarakat dapat mengelola segala sumberdaya sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat dikenal dengan istilah pengorganisasian masyarakat (*community organization*) dan pengembanga masyarakat (*community development*). Keduanya berorientasi pada proses pemberdayaan masyarakat menuju tercapainya kemandirian melalui keterlibatan dan peran serta aktif dari keseluruhan anggota masyarakat. Sedangkan definisi pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003:169) yaitu :

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, asehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal agar masyarakat tersebut dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik

di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut masih terpendam dalam diri yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki potensi, tetapi tidak setiap manusia berkehendak dan mau bekerja keras untuk mendayagunakan potensi tersebut. Pengertian potensi diri menurut Wiyono (2006:37): “Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bisa dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik”.

Jadi berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa potensi diri manusia adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

1.5 Hipotesis

Setelah melihat kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Hipotesis Utama :

Ho : Tidak terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

Hi : Terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi diri masyarakat di distrik di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

1.5.2 Sub Hipotesis

Ho : Tidak terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

Hi : Terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

Ho : Tidak terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

Hi : Terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap potensi diri masyarakat di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

1.6 Definisi Operasional

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

2. Potensi Diri

Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik.

3. Masyarakat Desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur. Masyarakat yang akan menerima manfaat pemberdayaan yaitu masyarakat lokal di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

4. Program Inovasi Desa

Inovasi desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya.

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Pernyataan	
Variabel X : Pemberdayaan Masyarakat	1. Lingkup kegiatan pemberdayan masyarakat	1. Bina manusia	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Sosialisasi mengenai pengembangan potensi masyarakat	
		2. Bina usaha	3. Peningkatan keterampilan usaha 4. Pelatihan pengembangan usaha 5. Peningkatan produktivitas dalam berbagai usaha	
		3. Bina lingkungan	6. Pembinaan mengenai pelestarian lingkungan 7. Pemanfaatan potensi lokal sebagai destinasi wisata	
		4. Bina kelembagan	8. Penyuluhan bagi aparatur kampung 9. Bimbingan kepada pegawai BUMKam	
		2. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat	5. Penyadaran	10. Usaha penyadaran lemahnya orientasi pembangunan 11. Sosialisasi untuk menjaga sumber daya alam
			6. Menunjukkan adanya masalah	12. Keterbukaan pengelolaan dana desa 13. Pengelolaan destinasi wisata
			7. Membantu pemecahan masalah	14. Pembentukan kelompok usaha untuk mengembangkan usaha 15. Pembangunan jalan di kampung Bakaro

		8. Menunjukkan pentingnya perubahan	16. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat 17. Kemandirian masyarakat 18. Sarana dan prasarana yang memadai
		9. Melakukan pengujian dan demonstrasi	19. Bantuan di bidang pendidikan
		10. Memproduksi dan publikasi informasi	20. Pemanfaatan tenaga profesional (Dinas Sosial, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, LPPM Unipa)
		11. Melaksanakan Pemberdayaan/penguatan kapasitas	21. Pemahaman tentang kegiatan kerajinan tangan 22. Sosialisasi pada bidang pertanian 23. Pelatihan diving 24. Pemenuhan kebutuhan nelayan dengan adanya perahu bantuan
	3. Strategi pemberdayaan masyarakat	12. Pemungkinan	25. Percaya diri dalam pengembangan potensi yang dimiliki 26. Pemerataan kegiatan pemberdayaan
		13. Penguatan	27. Mendorong komitmen kampung untuk mengalokasikan sumber dayanya
		14. Perlindungan	28. Terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dalam

		<p>kegiatan pemberdayaan</p> <p>29. Terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi</p> <p>15. Penyokongan</p> <p>30. Pemberian dukungan dalam berbagai bidang usaha</p> <p>16. Pemeliharaan</p> <p>31. Pemeliharaan rumah bantuan</p> <p>32. Pemeliharaan perahu bantuan</p> <p>33. Pemeliharaan sarana dan prasarana</p>	
Variabel Y : Potensi Diri	1.Kemampuan Fisik	<p>1.Kemampuan tugas yang menuntut keterampilan</p> <p>2.Kemampuan tugas untuk menuntut kekuatan</p>	<p>34. Kreatif dalam pembuatan kerajinan tangan</p> <p>35. Kreatif mengelolah wisata pantai</p> <p>36. Kreatif dalam pembuatan spot foto pada destinasi wisata</p> <p>37. Mampu mempromosikan destinasi wisata pemanggilan ikan</p> <p>38. Mampu memproduksi berbagai olahan makanan</p> <p>39. Mampu mengembangkan produk olahan makanan</p> <p>40. Mampu mendistribusikan hasil tangkapan nelayan</p> <p>41. Mampu membangun objek wisata pantai</p> <p>42. Mampu mengelolah fasilitas pantai</p>

			<p>43. Mampu mengembangkan potensi yang dimiliki</p> <p>44. Mampu berpartisipasi dalam kegiatan inovasi pemberdayaan</p> <p>45. Mampu memandu wisatawan dengan kemampuan <i>diving</i></p>
	2. Kemampuan mental	3. Kemampuan untuk berpikir	<p>46. Mampu memahami potensi yang dimiliki</p> <p>47. Mampu berpikir kritis untuk membangun kampung</p> <p>48. Mampu memanfaatkan limbah hasil perikanan untuk dijadikan bahan kerajinan tangan</p> <p>49. Mampu menghasilkan pemikiran yang kreatif untuk memproduksi kerajinan tangan</p>
		4. Kemampuan Untuk memecahkan masalah	<p>50. Mampu bercocok tanam menggunakan sistem pertanian ramah lingkungan</p> <p>51. Mampu berpartisipasi dalam pembuatan sumur bor</p> <p>52. Mampu berpartisipasi dalam pembuatan jalan</p> <p>53. Mampu membuat konsep desa wisata</p>

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah metode yang bersifat Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dianalisis guna menguji kebenaran hipotesis yang digunakan.

1.7.2 Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi menurut Soehartono (2015 : 57), yaitu : “jumlah keseluruhan unit analisis, atau objek yang akan diteliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang menerima manfaat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program inovasi desa yang terbagi ke dalam 3 RT yaitu (RT 01, RT 02 dan RT 03) yang ada di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari dengan total populasi sebanyak 150 orang yang diambil yang diambil 50% sebagai sampel, sehingga sehingga sampel yang diambil untuk menjadi responden sebanyak 75 orang, sebagai kelompok eksperimen yang menerima program dan kelompok kontrol yang tidak menerima program.

Sampel menurut Soehartono (2015 : 57), yaitu “suatu bagian dari populasi yang akan meneliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya”. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Area Random Sampling* (pengambilan sampel berdasarkan area/wilayah). *Area Random*

Sampling menurut Soehartono (2011:62) yaitu: “Cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan rumpun-rumpun yang menjadi unit sampling yang merupakan daerah atau wilayah geografis, seperti misalnya kota, kecamatan, atau desa”. Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel *Area Random Sampling* karena populasi penelitiannya tersebar pada tiga wilayah RT. Adapun jumlah populasi dari ketiga kelompok tersebut yaitu:

Tabel 1.2 Penarikan Sampel

No	RT	Kompepar	Sampel	Jumlah Sampel
1.	RT 01	50	50x50 %	25
2.	RT 02	50	50x50 %	25
3.	RT 03	50	50x50 %	25
Jumlah		150		75

1.7.3 Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tentang Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Potensi Diri Masyarakat Desa di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari, adalah:

1. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, brosur yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan.
- b. Angket yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diajukan kepada responden.
- c. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari para petugas, pimpinan serta masyarakat (responden).

1.7.4 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan skala ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian skala ordinal menurut Soehartono (2015:76), menyatakan bahwa:

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya dari pada golongan yang lain.

Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah model Likert, yaitu skala yang mempunyai nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan yang dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas jumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur.

Skala Likert bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut:

- a. Katagori jawaban sangat tertinggi diberi nilai 5
- b. Katagori jawaban tinggi diberi nilai 4
- c. Katagori jawaban cukup atau sedang diberi nilai 3
- d. Katagori jawaban rendah diberi nilai 2
- e. Katagori jawaban sangat rendah diberi nilai 1

1.7.5 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data kuantitatif. Untuk data kuantitatif dipergunakan uji statistik dengan rumus U Mann-Whitney, karena menggunakan dua sampel yang independen, dan dengan menggunakan skala ordinal. Sedangkan data kualitatif sendiri dijelaskan dengan pemaparan suatu kalimat yang logis. Adapun langkah-langkah pengujian data kuantitatif dengan uji statistik dalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan dua kelompok seolah-olah ada satu kelompok
2. Menjumlah skor jawaban responden masing-masing kelompok (kelompok I dan kelompok II), kemudian diberi rangking pada setiap skor dari mulai skor terkecil sampai dengan skor terendah.
3. Menghitung rumus:
4. Teknik perhitungan sampel ditentukan sebagai berikut :

$$U = n_1 \cdot n_2 + \frac{(n_1 + n_2)}{2} R_1 \text{ atau } U = n_1 \cdot n_2 + \frac{(n_1 + n_2)}{2} R_2$$

Rumus U yang digunakan adalah U yang terkecil atau utama.

Adalah Rumus yang digunakan U yang terkecil atau utama

$$U_{\text{skor}} = n_1 \cdot n_2 - U_{\text{utama}}$$

Keterangan :

u = Simbol statistik yang dipakai dalam *U.Mann Whitney*

n_1 = Jumlah responden kelompok eksperimen

n_2 = Jumlah responden kelompok kontrol

R_1 = Jumlah rangking kelompok eksperimen

R_2 = Jumlah rangking kelompok kontrol

Pengujian statistik ini didasarkan pada karakteristik kelompok yaitu kedua kelompok saling lepas dan keduanya memiliki skala ordinal, hasil perhitungan dari rumus U dimasukkan ke dalam Z_{hitung} dengan rumus :

$$Z_{\text{hitung}} = \frac{U_{\text{skor}} - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\left(\frac{n_1 n_2}{N-1}\right) \left(\frac{N_3 \cdot N - \sum T^2}{12}\right)}}$$

Dimana : $N = n_1 + n_2$

$$T = \frac{t^3 \cdot t}{12}$$

Dimana :

T = banyaknya observasi yang berangka sama satu rank tertentu.

Kriteria pengujian hipotesis :

Pada taraf signifikan 5% jika Z_{hitung} besar dari Z_{tabel} maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Prosedurnya adalah :

- a. Tentukan harga-harga n_1 dan n_2 dari dua kelompok itu, dengan tabel sampel $N = n_1 + n_2$
- b. Berikan rangking bersama-sama skor kedua kelompok itu, rangking 1 diberi skor yang secara aljabar paling rendah. Rangking tersusun mulai dari satu hingga N untuk observasi-observasi yang berangka sama, diberikan rata-rata rangking sama.
- c. Tentukan harga U , baik dengan cara menghitung maupun dengan menerapkan rumus.

Hasil perhitungan dari rumus dibanding dengan kriteria :

H_0 ditolak, H_1 diterima jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ H_0 ditolak, H_1 ditolak jika $Z_{hitung} < Z_{tabel}$.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai berikut :

1. Kampung Bakaro merupakan salah satu kampung yang mendapatkan program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Kemendesa PDTT) yang tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Inovasi Desa. Program Inovasi Desa merupakan sebuah program untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa menggunakan dana desa. Tetapi nampaknya Kampung Bakaro masih belum memiliki orientasi pembangunan yang jelas serta dana desa yang belum digunakan secara optimal.

2. Permasalahan kemiskinan, kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam di pedesaan yang belum sepenuhnya terealisasi dengan baik merupakan masalah-masalah yang ada di Kampung Bakaro. Sehingga diperlukannya pemberdayaan masyarakat melalui program Inovasi Desa, tetapi masyarakat harus lebih dahulu memahami program tersebut.

1.8.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini adalah 6 bulan terhitung dari bulan Desember 2019 sampai Mei 2020. Selama waktu tersebut, proses kegiatan penelitian dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Tahap persiapan.
2. Tahap penelitian.
3. Tahap pelaporan.

Tabel 1.3**Jadwal Kegiatan Penelitian**

NO	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		2019		2020			2021	
		Nov	Des	Jan	Feb	Sep	Ags	Sep
Tahap Pra Lapangan								
1.	Penjajakan							
2.	Studi Literatur							
3.	Penyusunan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Penyusunan Pedoman Wawancara							
6.	Pengumpulan Data							
7.	Pengelolaan dan Analisis Data							
Tahap Penyusunan Laporan								
8.	Bimbingan Penulisan							
9.	Pengesahan Hasil Penelitian							
10.	Sidang Laporan Akhir							